



Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pendidikan Dasar Berbasis Agama: Madrasah Ibtidaiyah dan Tantangan Inklusi

Muhammad Risaldin

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email: muhammadrisaldin5@iainkendari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) di Kota Kendari, dengan fokus pada aspek keadilan sosial dalam ruang kelas. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketimpangan antara kebijakan inklusif yang ada dan praktik di lapangan, serta kurangnya pemahaman guru tentang strategi pembelajaran yang adaptif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan inklusif diimplementasikan di MI dan dampaknya terhadap pengajaran serta keberagaman siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa MI di Kendari, melibatkan wawancara dengan guru, kepala madrasah, serta observasi ruang kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai inklusif telah diterima secara normatif, penerapannya masih terbatas oleh faktor seperti kurangnya pelatihan, ketidaksesuaian kebijakan internal, dan kepemimpinan yang tidak konsisten. Dampaknya adalah keberhasilan inklusi yang sporadis dan tidak merata di seluruh madrasah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru dan kepala madrasah, serta penguatan kebijakan internal yang lebih sistematis dan berbasis data untuk mendukung pendidikan inklusif yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Madrasah Ibtidaiyah, Pembelajaran Adaptif, Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

This study examines the implementation of inclusive education policies in Madrasah Ibtidaiyyah (MI) in Kendari City, focusing on aspects of social justice in the classroom. The main problems identified are the gap between existing inclusive policies and practices in the field, as well as teachers' lack of understanding of adaptive learning strategies for students with special needs. The purpose of this study was to evaluate the extent to which inclusive policies are implemented in MI and their impact on teaching and student diversity. This study used a qualitative approach with a case study method in several MIs in Kendari, involving interviews with teachers, madrasah principals, and classroom observations. The results showed that although inclusive values have been normatively accepted, their implementation is still limited by factors such as lack of training, inconsistencies in internal policies, and inconsistent leadership. The impact is sporadic and uneven success of inclusion across madrasahs. This study recommends the need for ongoing training for teachers and madrasah principals, as well as strengthening more systematic and data-based internal policies to support more effective and equitable inclusive education.

Keywords: Social Justice, Madrasah Ibtidaiyah, Adaptive Learning, Citizenship Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial anak sejak usia dini, termasuk internalisasi nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat (Arifin & Hasanah, 2024). Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, keadilan sosial bukan hanya merupakan nilai moral, tetapi juga mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (Azizah et al., 2021). Implementasi nilai tersebut dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada konten kurikulum, tetapi juga pada pendekatan pedagogis yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman peserta didik (Pramesworo, 2025; Astarita, et.al., 2024). Madrasah Ibtidaiyyah (MI), sebagai lembaga pendidikan dasar berbasis keagamaan, memiliki potensi signifikan dalam mendukung misi konstitusional ini. Keberadaannya yang tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menjadikan MI sebagai aktor kunci dalam perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang adil.

Namun demikian, sejauh mana prinsip keadilan sosial telah terimplementasi dalam praktik pendidikan di MI masih menjadi pertanyaan kritis, terutama dalam kerangka pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang menekankan penerimaan dan pemberdayaan semua peserta didik tanpa diskriminasi merupakan wujud nyata dari keadilan sosial di ruang kelas (Idris et al., 2023). Meski kebijakan pendidikan nasional telah mengadopsi prinsip inklusivitas, terdapat kebutuhan untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut direalisasikan dalam konteks unik MI yang menggabungkan nilai-nilai agama, sosial, dan kultural lokal (Assingkily, et.al., 2023). Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami dinamika antara kebijakan, praktik, dan nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan dasar keagamaan di Indonesia (Abidin et al., 2024).

Meskipun kerangka kebijakan pendidikan nasional Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan, khususnya Madrasah Ibtidaiyyah, masih menyisakan berbagai tantangan konseptual dan praktis (Fikri et al., 2024). Dalam konteks MI yang memiliki karakteristik religius dan kultural yang khas, penerapan pendidikan inklusif kerap berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, pemahaman guru yang beragam, serta resistensi terhadap perubahan pendekatan pedagogis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan inklusif yang dirancang pada level makro telah mampu diterjemahkan secara utuh dan efektif dalam praktik kelas, terutama dalam menjangkau peserta didik dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kemampuan belajar yang beragam (Syarifudin, 2021).

Lebih jauh, terdapat indikasi adanya kesenjangan antara retorika kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Beberapa MI masih menunjukkan praktik eksklusif terselubung, baik dalam bentuk penolakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus maupun minimnya adaptasi kurikulum yang responsif terhadap keberagaman. Selain itu, belum banyak studi yang secara spesifik mengevaluasi bagaimana prinsip keadilan sosial dijalankan melalui pendekatan inklusif dalam ruang kelas MI, yang menggabungkan dimensi pedagogis dan religius. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara kritis mengidentifikasi permasalahan utama dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di MI serta menelusuri bagaimana perwujudan keadilan sosial dapat (atau belum dapat) tercapai di lingkungan pendidikan dasar keagamaan tersebut (Ramayani et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif yang diadopsi oleh pemerintah telah diimplementasikan secara efektif dalam lingkungan Madrasah Ibtidaiyyah (MI), khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan keadilan sosial di ruang kelas. Penekanan diberikan pada proses internalisasi prinsip inklusivitas dalam praktik pembelajaran, interaksi sosial di sekolah, serta tata kelola kelembagaan yang mendukung atau menghambat partisipasi aktif seluruh peserta didik tanpa diskriminasi (Mi et al., 2024). Dengan mengkaji praktik nyata di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan inklusi dalam konteks pendidikan dasar berbasis keagamaan.

Lebih khusus, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik inklusif yang berkembang di MI, mengungkap tantangan struktural maupun kultural yang dihadapi oleh pendidik dan pengelola madrasah, serta menganalisis kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi faktual. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik terkait pendidikan inklusif dan keadilan sosial dalam pendidikan Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan dan

praktik pendidikan yang aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada transformasi sosial yang berkeadilan sejak tingkat pendidikan dasar (Choiriyah, 2016).

Meskipun literatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir, sebagian besar kajian masih berfokus pada konteks sekolah umum dan belum banyak menyentuh ranah madrasah, khususnya Madrasah Ibtidaiyyah (MI), (Winda Fionita & Ely Nurjannah, 2024). Padahal, MI memainkan peran penting dalam ekosistem pendidikan nasional, terutama di wilayah dengan dominasi masyarakat muslim dan akses terbatas terhadap sekolah formal. Kurangnya perhatian terhadap MI dalam studi-studi inklusi menyebabkan terbatasnya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai keadilan sosial diinternalisasi dan diimplementasikan dalam ruang kelas yang tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan kultural. Hal ini menciptakan celah pengetahuan yang perlu dijembatani melalui kajian empiris yang kontekstual dan kritis (Pratiwi, 2024).

Lebih lanjut, banyak penelitian tentang pendidikan inklusif menitikberatkan pada aspek normatif atau kebijakan di tingkat nasional, tanpa menjangkau dimensi praksis di level satuan Pendidikan (Erva Karimatunisa & Taufik Muhtarom, 2024). Konsekuensinya, terdapat kekurangan bukti yang menggambarkan realitas implementasi di lapangan termasuk sejauh mana guru MI memahami dan menjalankan prinsip inklusivitas, bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik pembelajaran, serta bagaimana hambatan sosial, budaya, dan institusional memengaruhi keberhasilannya (Rahmi & Muqowim, 2022). Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis berbasis data lapangan mengenai penerapan pendidikan inklusif di MI sebagai instrumen keadilan sosial, sekaligus memperkaya diskursus akademik yang masih didominasi oleh pendekatan homogen dan kurang sensitif terhadap konteks lokal keagamaan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam kajian pendidikan inklusif dengan mengarahkan fokus secara spesifik pada Madrasah Ibtidaiyyah sebagai locus kajian keadilan sosial dalam pendidikan dasar keagamaan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat generik dan berorientasi pada institusi formal sekuler, riset ini menyajikan perspektif yang khas, yakni integrasi antara nilai-nilai religius Islam dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam praktik pembelajaran (Sukma et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang pendidikan inklusif di Indonesia, tetapi juga membuka ruang dialog antara nilai-nilai lokal-keagamaan dan agenda keadilan sosial global, yang selama ini masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam konteks MI.

Justifikasi akademik dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan literatur terkait pelaksanaan pendidikan inklusif dalam madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai dan spiritualitas (Sulthon, 2018). Dengan memadukan pendekatan evaluatif terhadap kebijakan, observasi praktik kelas, serta analisis terhadap tantangan sosial-kultural yang dihadapi MI, studi ini menghadirkan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat memperluas model konseptual pendidikan inklusif yang kontekstual dan sensitif terhadap nilai keagamaan. Sementara secara praktis, hasil studi diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap realitas lokal, serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan MI sebagai agen transformasi sosial dalam kerangka keadilan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk memahami secara mendalam dinamika penerapan pendidikan inklusif sebagai perwujudan keadilan sosial dalam konteks Madrasah Ibtidaiyyah (MI). Fokus utama penelitian ini adalah pada makna, proses, dan pengalaman yang muncul dari interaksi antar-aktor pendidikan di lingkungan MI, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan inklusi di ruang kelas.

Pendekatan Penelitian

Dalam kerangka kualitatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti menggali fenomena secara kontekstual dan holistik. Studi kasus digunakan untuk mendalami praktik pendidikan inklusif di MI dengan mempertimbangkan latar sosial, budaya, dan religius yang membentuk realitas pendidikan di lembaga tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi atas persepsi dan interpretasi para pelaku pendidikan mengenai keadilan sosial dalam pembelajaran sehari-hari.

Latar Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyyah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan beberapa pertimbangan: (1) keberadaan MI yang merepresentasikan karakteristik sosial-keagamaan masyarakat urban perbatasan; (2) variasi kebijakan internal madrasah terkait inklusivitas; dan (3) keterbukaan lembaga terhadap kegiatan penelitian. Kota Kendari juga dipilih karena merupakan wilayah dengan dinamika sosial dan pluralitas yang cukup tinggi, sehingga memberikan konteks yang kaya bagi eksplorasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pendidikan dasar berbasis agama.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan kriteria tertentu yang relevan terhadap tujuan penelitian. Informan utama terdiri atas: (1) kepala madrasah sebagai pengambil kebijakan internal; (2) guru kelas dan guru mata pelajaran yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran inklusif; (3) peserta didik dengan latar belakang sosial dan kemampuan yang beragam; dan (4) orang tua siswa, khususnya dari kelompok rentan (misalnya keluarga dengan disabilitas atau ekonomi lemah). Jumlah informan disesuaikan dengan prinsip saturasi data, yakni ketika informasi yang diperoleh mulai menunjukkan pola yang berulang dan tidak ada data baru yang signifikan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi terhadap pandangan, pengalaman, dan praktik informan dalam konteks pendidikan inklusif. (2) Observasi partisipatif, dengan peneliti mengamati langsung interaksi pembelajaran di kelas, dinamika sosial antarsiswa, serta praktik manajemen sekolah yang berkaitan dengan inklusivitas. Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi terbuka dan catatan lapangan (Assingky, 2021). (3) Studi dokumentasi, yang mencakup penelaahan terhadap dokumen-dokumen kebijakan madrasah, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), kurikulum, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan sosial dan pendidikan inklusif.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis tematik (thematic analysis), yang terdiri atas tahapan: (1) transkripsi dan pembacaan data secara menyeluruh; (2) pemberian kode awal terhadap data yang relevan; (3) pengelompokan kode menjadi tema-tema utama; (4) peninjauan ulang tema untuk menjamin koherensi dan keterkaitan antar-tema; dan (5) interpretasi data dalam kaitannya dengan kerangka teori dan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif, memungkinkan tema-tema utama muncul dari data lapangan secara alami, bukan berdasarkan asumsi a priori peneliti.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria utama dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu: (1) Kredibilitas, dicapai melalui triangulasi sumber dan teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), member checking, serta keterlibatan intensif di lapangan. (2) Transferabilitas, diperkuat dengan deskripsi kontekstual yang rinci dan kaya (thick description) agar pembaca dapat menilai relevansi temuan terhadap konteks lain. (3) Dependabilitas, dijaga melalui audit trail, yakni dokumentasi sistematis terhadap proses pengumpulan dan analisis data. (4) Konfirmabilitas, dicapai dengan menjaga objektivitas interpretasi melalui pencatatan refleksi peneliti dan pengujian silang terhadap data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap dinamika implementasi pendidikan inklusif sebagai perwujudan keadilan sosial dalam konteks Madrasah Ibtidaiyyah (MI) di Kota Kendari. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kebijakan inklusif telah dicanangkan secara nasional, implementasinya di level MI masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan pedagogis yang signifikan. Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan yang lebar antara isi kebijakan tertulis dengan praktik pembelajaran inklusif yang berlangsung

di ruang kelas. Guru-guru di MI pada umumnya memahami pentingnya nilai keadilan sosial, tetapi pemahaman tersebut belum secara utuh terinternalisasi ke dalam desain pembelajaran, strategi pengajaran, maupun interaksi interpersonal antarsiswa.

Analisis data menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut terutama disebabkan oleh minimnya pelatihan yang berorientasi pada pendidikan inklusif berbasis konteks madrasah. Guru lebih banyak mengandalkan intuisi personal atau nilai-nilai keagamaan umum dalam menanggapi keragaman kebutuhan siswa, alih-alih menerapkan pendekatan pedagogis yang terstruktur dan berbasis bukti. Di satu sisi, pendekatan berbasis nilai Islam seperti kasih sayang, tolong-menolong, dan keadilan moral menjadi kekuatan kultural dalam menunjang praktik inklusif. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut tidak selalu didukung oleh pemahaman metodologis yang memadai tentang strategi pembelajaran diferensial atau manajemen kelas inklusif.

Temuan lain menunjukkan adanya praktik eksklusi tersembunyi (*hidden exclusion*), yang terjadi bukan karena niat diskriminatif, melainkan karena keterbatasan kompetensi guru dalam mengidentifikasi dan merespons kebutuhan khusus siswa. Misalnya, siswa dengan kesulitan belajar ringan atau berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rendah cenderung tidak mendapat dukungan pembelajaran tambahan yang memadai. Hal ini diperparah dengan ketiadaan kebijakan internal madrasah yang mengatur mekanisme intervensi khusus, serta minimnya kolaborasi antara guru kelas dengan tenaga pendukung seperti konselor atau guru pendamping khusus.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kepala madrasah memiliki peran sentral dalam mendorong atau menghambat praktik inklusif. Di beberapa madrasah, kepala sekolah menunjukkan kepemimpinan transformasional yang progresif, mendorong guru untuk lebih responsif terhadap keanekaragaman siswa, serta membuka ruang untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Namun di madrasah lain, otoritas kepala sekolah justru mempertahankan status quo, menghindari inovasi dengan alasan keterbatasan sumber daya atau kekhawatiran terhadap resistensi budaya. Kondisi ini menciptakan variabilitas yang tinggi dalam mutu penerapan pendidikan inklusif antar-MI di wilayah yang sama.

Data observasi di ruang kelas menunjukkan bahwa guru-guru yang memiliki pengalaman lebih dalam pendidikan keagamaan dan nilai-nilai moderat Islam cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman dan menunjukkan praktik inklusif yang lebih sadar. Mereka cenderung memberikan ruang partisipasi yang adil bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, serta menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Sebaliknya, guru yang masih memegang kuat pendekatan tekstual-konservatif terhadap ajaran agama cenderung memiliki sikap homogenis terhadap siswa, yang berdampak pada rendahnya partisipasi siswa dari kelompok minoritas atau yang dianggap "berbeda."

Hasil studi dokumentasi memperkuat temuan bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan madrasah. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, dan dokumen evaluasi masih bersifat standar dan tidak mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Dalam beberapa kasus, madrasah tidak memiliki data yang sistematis terkait keberadaan siswa berkebutuhan khusus atau tidak mengklasifikasikan kebutuhan belajar secara jelas, sehingga sulit dilakukan intervensi berbasis data. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pencatatan dan pemetaan kebutuhan di lingkungan MI.

Interpretasi terhadap hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di MI belum dipahami sebagai bagian integral dari keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Keadilan sosial masih dipersepsikan secara normatif dan moralistik, belum sebagai prinsip operasional dalam desain dan praktik pembelajaran. Oleh karena itu, perlu ada penguatan paradigma inklusif dalam pendidikan guru MI, dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial ke dalam kurikulum pendidikan guru madrasah secara eksplisit. Selain itu, reformulasi kebijakan madrasah berbasis data dan kebutuhan riil siswa menjadi krusial untuk menjembatani gap antara kebijakan dan praktik.

Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian pendidikan inklusif berbasis lokal-keagamaan, yang selama ini masih minim dalam literatur internasional. Konteks MI di Indonesia menunjukkan bahwa inklusivitas tidak dapat dipaksakan melalui model universal, tetapi harus disesuaikan dengan sistem nilai dan praktik budaya yang ada. Pendidikan Islam yang bercorak rahmatan lil 'alamin memiliki potensi besar untuk menginternalisasi prinsip inklusi, asalkan disertai dengan dukungan kebijakan, pelatihan guru yang komprehensif, dan kepemimpinan madrasah yang transformatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional madrasah dalam menjamin inklusivitas sebagai bagian dari keadilan sosial. Tidak cukup hanya dengan wacana normatif, tetapi perlu kerja sistemik yang melibatkan perbaikan struktural, peningkatan literasi pedagogis guru, serta kolaborasi antara madrasah, komunitas, dan pemerintah. Pendidikan inklusif di MI dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kohesi sosial, mengatasi ketimpangan pendidikan, dan membangun generasi yang lebih adil, toleran, dan transformatif sejak usia dini

SIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) di Kota Kendari dalam upaya mencapai keadilan sosial dalam pendidikan. Berdasarkan analisis yang mendalam, beberapa temuan kunci berhasil diidentifikasi yang menggambarkan tantangan dan peluang dalam penerapan pendidikan inklusif di MI.

Temuan pertama menunjukkan bahwa meskipun kebijakan inklusif telah diterapkan secara formal, praktik di ruang kelas MI masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan prinsip inklusi secara efektif. Banyak guru yang memiliki pemahaman yang baik mengenai keadilan sosial secara normatif, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip tersebut dalam strategi pembelajaran yang adaptif. Kedua, meskipun nilai-nilai keagamaan Islam yang mendorong keadilan dan kesetaraan sering kali menjadi motivasi di balik praktik inklusif, kekurangan pelatihan dan dukungan yang memadai menyebabkan implementasi inklusi lebih bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Temuan ketiga adalah bahwa kepala madrasah berperan penting dalam mendorong atau menghambat pelaksanaan kebijakan inklusif. Variasi kualitas kepemimpinan kepala madrasah berkontribusi besar pada hasil implementasi kebijakan tersebut. Di beberapa madrasah, kepala sekolah yang progresif mendorong penerapan kebijakan inklusif secara lebih efektif, sedangkan di madrasah lainnya, keterbatasan kepemimpinan menghambat upaya tersebut.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan kebijakan formal, tetapi memerlukan penguatan sistem pendukung yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas guru dan kepala madrasah. Pendidikan inklusif yang berbasis pada keadilan sosial memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis pada data yang akurat tentang kebutuhan siswa. Tanpa dukungan dari kebijakan internal yang jelas dan pelatihan yang sistematis bagi guru, kebijakan inklusi akan tetap berjalan tidak efektif. Selain itu, penting bagi MI untuk membangun sinergi antara pihak madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Tanpa adanya dukungan holistik dari seluruh pihak, implementasi inklusivitas akan sulit mencapai tujuannya.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pertama, pengembangan dan implementasi pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi guru MI tentang pendidikan inklusif, dengan fokus pada pendekatan pedagogis yang adaptif dan berbasis bukti. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang keberagaman kebutuhan siswa dan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua peserta didik. Kedua, kepala madrasah perlu diberdayakan melalui penguatan kepemimpinan berbasis inklusi, sehingga mereka dapat mendorong kebijakan ini dengan lebih efektif di seluruh level madrasah. Ketiga, disarankan agar madrasah melakukan pemetaan yang lebih komprehensif terkait siswa berkebutuhan khusus dan merancang intervensi yang berbasis data untuk memberikan dukungan yang tepat. Terakhir, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kolaborasi antara madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang ekonomi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I., & Hasanah, U. (2024). *Membangun Kesadaran Sosial Siswa Sejak Dini melalui Pendidikan IPS di Sekolah Dasar*. 2(2), 121–127.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Assingkily, M. S., Hasri, K. S., Pratiwi, E., Fadilla, P. A., & Sabrina, T. (2023). Concept Analysis and Implementation of “Kampus Merdeka” in Civics Learning for PGMI Study Program Students. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 2(3), 134-139. <https://doi.org/10.61253/jcgcs.v2i3.213>.
- Astarita, C., Helfina, S., Umaternate, F., & Assingkily, M. S. (2024). Pancasila Sebagai Filsafat: Tinjauan Analisis Pemahaman dan Sikap Mahasiswa. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 86-93. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih/article/view/21>.
- Abidin, M. Z., Nusantara, U. B., & Humanity, C. (2024). *ADIL DAN BERADAB*. 8(11), 3788–3793.
- Azizah, S. N., Fatimah, S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila pada Anak Sekolah Dasar dengan Berlandaskan Metode Contextual Teaching Learning. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4802–4809. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1547>
- Choiriyah, S. (2016). *Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Inklusif di Jawa Tengah Indonesia*. 3211.
- Erva Karimatunisa, & Taufik Muhtarom. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 101–107. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1369>
- Fikri, M., Nasir, A., & Kudus, I. (2024). Membangun Madrasah Inklusif : Upaya Menuju Sekolah Ramah Diversitas Melalui Implementasi Pendidikan Inklusif Di Madrasah Ibtidaiyah. *JPDI: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 6(1), 21–44.
- Idris, Arief, A., & Saihu, M. (2023). Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 57–75.
- Mi, D. I., Kranji, W., Pekalongan, K., & Pekalongan, K. H. A. W. (2024). *DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS INKLUSI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI*.
- Pramesworo, I. S. (2025). *Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Inklusif dalam Pendidikan Umum : Tinjauan Literatur Terbaru*. 11, 1–12.
- Pratiwi, S. H. (2024). *PERSEPSI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH ELSE (Elementary School Education*. 8(1), 165–176.
- Rahmi, A., & Muqowim, M. (2022). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Madrasah di Sumatera Barat. *Ranab Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), 112–122. <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i2.442>
- Ramayani, W., Puspita, S., Kurniawaty, K., Hasanah, C. S., & Wismanto, W. (2024). Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 26–34. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1141>
- Sukma, E., Damanik, D., & Karim, P. A. (2024). *Inclusive Teaching Strategy as a Reinforcement of Religious Moderation in Madrasah Ibtidaiyah , Teluk Nibung District*. 8(1), 1069–1077.
- Sulthon, S. (2018). Model Pelayanan Pendidikan Inklusi di Madrasah. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 151–172.
- Syaifudin, M. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Timur. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 184–200. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.184-200>
- Winda Fionita, & Ely Nurjannah. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(2), 302–311. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i2.2968>